



UJIAN NASIONAL

PEMERINTAH TAK KHAWATIR TERJADI KEBOCORAN

Siswa lebih santai menghadapi ujian nasional kali ini.

Raihul Fadjri

fadjri@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yakin isu bocoran kunci jawaban ujian nasional tak lagi dominan setelah pemerintah menetapkan ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan siswa. "Tak ada informasi dan laporan apa pun yang masuk ke dinas ihwal bocornya soal ujian kali ini," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori kemarin.

Menurut dia, siswa dan sekolah sudah paham bahwa ujian kali ini dilakukan untuk pemantauan potensi siswa. "Bukan ajang mencari kelulusan belaka," ujar Budi.

Hal yang sama diakui oleh Dinas Pendidikan Gunungkidul. "Kami sama sekali tak mendapat informasi

peredaran bocoran soal atau kunci jawaban itu selama distribusi soal dan persiapan ujian ini," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Bahron Rosyid kemarin.

Tapi, kata Bahron, instansinya tetap mengawasi secara ketat. "Terutama saat distribusi soal ke rayon dan ke sekolah masih melibatkan kepolisian," ujarnya. Instansinya akan fokus pada distribusi materi ujian yang berlangsung aman dan tepat waktu, baik yang ujian *online* maupun konvensional. "Seluruh soal UN *online* sudah selesai diunduh seluruhnya kemarin, lancar tanpa kendala," katanya.

Toh, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta tetap membuka pos pengaduan pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan ujian. "Posko itu kami buka di Bali Kota Yogyakarta agar

seluruh warga bisa mengadakan jika mencium kecurangan," ujar aktivis Forpi Baharuddin Kamba. Dia juga meminta siswa segera melapor ke lembaganya jika tak bisa ikut ujian karena masalah tunggakan biaya pendidikan. "Bisa via *e-mail* di forpijogja@yahoo.com atau 081392678900," ucapnya.

Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan menerjunkan tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan ujian nasional di sejumlah sekolah. Ketua ORI DIY Budhi Masturi mengatakan salah satu fokus pengawasan itu ialah sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. "Kami akan berkeliling ke sejumlah sekolah selama ujian sejak hari pertama," kata dia.

Menurut Budhi, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer perlu pantauan. Sebab, model ujian ini baru pertama diterapkan. "Patokan pengawasan ialah kesesuaian penyelenggaraan ujian

dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan," ujarnya.

Budhi mencontohkan petunjuk teknis itu mewajibkan perangkat komputer fasilitas ujian tersebut milik sekolah dan bukan pinjaman. Semua perangkat harus dalam bentuk *personal computer*. "Tidak boleh jenis lainnya seperti laptop," katanya.

Kepala SMAN 8 Kota Yogyakarta, Munjid Nur Alamsyah, mengakui mayoritas siswanya lebih santai menghadapi ujian nasional kali ini. Penyebabnya, mereka tahu ujian nasional tak menentukan kelulusan. Tapi dia mengingatkan hasil ujian bisa mempengaruhi peluang masuk perguruan tinggi. "Bagi sekolah, hasil UN penting karena menyangkut peringkat kualitas pendidikan lembaga kami," kata dia.

Di SMKN 5 Kota Yogyakarta, siswa peserta ujian malah lebih antusias. "Karena mereka menjajal ujian nasional model ujian berbasis komputer," kata Kepala Sekolah Suyono.

● PRIBADI WICAKSONO | ADDY MANAHIUBUN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005